Bawaslu Kabupaten Pasuruan Usulkan Rp 27 M Untuk Pengawasan Pilkada 2024

Selasa, 2 Agustus 2022

Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengajukan anggaran sebesar Rp 27 miliar untuk pengawasan Pilkada 2024. Anggaran ini akan digunakan untuk honorarium petugas adhoc yang terdiri dari Panwascam, Pengawas Kelurahan dan Desa, serta Pengawas TPS. Jumlah petugas yang dibutuhkan mencapai ribuan orang, mulai dari 72 orang Panwascam hingga 3.096 orang petugas di TPS.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk honorarium petugas adhoc, biaya operasional, pendidikan dan partisipatif, serta sosialisasi kepada masyarakat. Jumlah honorarium untuk setiap petugas pengawas rata-rata melebihi Rp 1 juta. Rekruitmen petugas adhoc akan dilaksanakan sekitar bulan September 2022.

Bawaslu mengusulkan anggaran tersebut secara bertahap, yaitu 40% pada tahun 2023 dan 60% pada tahun 2024. Anggaran ini diperlukan untuk memastikan kelancaran pengawasan Pilkada Kabupaten Pasuruan.

Dengan anggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasuruan diharapkan dapat menjalankan tugas pengawasan dengan baik dan memastikan proses Pilkada 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Bawaslu Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk mengawasi Pilkada 2024 dengan profesional dan transparan. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pilkada Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.